Kemenkes BKK Tembilahan	Nomor SOP : OT.02.02/C.XI.12/68/2026
	Tgl. Pembuatan : 6 Januari 2023
	Tgl. Revisi : 22 September 2026 (Revisi 4)
	Tgl. Efektif : 23 September 2026
	Disahkan oleh :
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT** **BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II TEMBILAHAN**	**Plt. KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II TEMBILAHAN** **Hj. Lisma, S.IP, M.A.P** **NIP 196903281990032001**
	Nama SOP : **Pengujian Konsekuensi**

Dasar hukum :		**Kualifikasi Pelaksana :**
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	1. Memahami peraturan perundang-undang terkait informasi Publik
2	Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	2. Memahami prosedur Pemberian Informasi Publik
3	Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. Memahami strategi dan kebijakan kesehatan
4	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Menguasai Komunikasi yang baik
5	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	5. Memiliki Kemampuan Pendokumentasian Informasi
6	Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan	6. Menguasai Teknolgi Informasi
7	Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	
Keterkaitan :		**Peralatan / Perlengkapan :**
1	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik	1. Peraturan dan Pedoman terkait pelaksanaan Kegiatan
2	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2. Komputer / Laptop yang dilengkapi program kerja
3	SOP Pemutakhiran Data Informasi Publik	3. Jaringan Internet
4	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan	4. ATK, Formulir

Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
Apablia SOP Pengujian Konsekuensi tidak disusun, maka pengujian informasi publik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya	1. Buku Tamu / Agenda 2. Daftar Pemohon

Prosedur

No.	Aktivitas					Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID Pelaksana	PPID	Petugas Pelayanan Informasi	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan inventarisasi pelayanan publik yang berpotensi dikecualikan					Agenda Kerja	2 Hari Kerja	Disposisi	
2	Menginventarisir informasi yang berpotensi dikecualikan					Dolumen	2 Hari Kerja	Dokumen	
3	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					List daftar informasi yang berpotensi sebagai infomasi yang dikecualikan	1 Hari Kerja	List daftar informasi yang berpotensi sebagai infomasi yang dikecualikan	
4	Menyampaikan daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					List daftar informasi yang berpotensi sebagai infomasi yang dikecualikan dan dokuimen informasi	1 Hari Kerja	List daftar informasi yang berpotensi sebagai infomasi yang dikecualikan	
5	Melakukan pengujian konsekuensi atas dasar informasi yang dikecualikan					Dokuimen informasi dan List daftar informasi yang berpotensi sebagai infomasi yang dikecualikan	3 hari kerja	List daftar informasi yang berpotensi sebagai infomasi yang dikecualikan	
6	Memeriksa dan mempertimbangkan daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan kedalam lembar uji konsekuensi dan memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					Dokumen daftar usulan informasi yang dikecualikan	3 Hari Kerja	List daftar informasi yang berpotensi sebagai infomasi yang dikecualikan	
7	Konsinyasi draft pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					Draft lembar pengujian konsekuensi	3 Hari Kerja	Draft lembar pengujian konsekuensi	
8	Menyampaikan lembaran konsekuensi dan meminta pertimbangan serta persetujuan atasan PPID Pelaksana					Lembar pengujian konsekuensi	1 Hari Kerja	Lembar pengujian konsekuensi	
9	Pertimbangan atas lembar pengujian konsekuensi					Bahan pengujian konsekuensi	2 Hari Kerja	Lembar pengujian konsekuensi	
10	Menetapkan ionformasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi informasi yang dikecualikan dalam bentuk keputusan	Tidak				SK Informasi yang dikecualikan	1 Hari Kerja	SK Informasi yang dikecualikan	
11	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi		Ya			Laporan	1 Hari Kerja	Laporan	SOP Pengarsipan Surat